

PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
2022

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NO 4, LD 2022/ NO 290, TLD NO 10, 113 HLM.

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah..
- Dasar hukum Qanun ini adalah UUD 1945; UU No 14 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; ; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 5 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Qanun A. Singkil No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun A. Singkil No. 6 Tahun 2021.
 - Dalam Qanun A. Singkil tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil meliputi Pengelola Keuangan Daerah, Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPK, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK, Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPK, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, TAPK, APBK, SatuanHitung dalam APBK, Struktur APBK, Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli daerah, Pendapatan Transfer dan lain lain Pendapatan Daerah yang Sah,Belanja Kabupaten, Standar Harga Kabupaten, Pembiayaan Daerah, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, Surplus dan Defisit, Penyusunan Rancangan APBK, kebijakan Umum APBK dan prioritas Plafon Anggaran Sementara, Rencana Kerja dan Anggaran SKPK, Tata cara Penyusunan rencana Kerja dan Anggaran SKPK, Penyiapan Raqan APBK, Penetapan APBK, Penyampaian dan Pembahasan Raqan APBK, Persetujuan Raqan APBK, Evaluasi Raqan APBK dan Ranperbup Penjabaran APBK, Penetapan Qanun APBK dan Perbup Penjabaran APBK, Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah, Penyiapan DPA SKPK, Anggaran Kas dan SPD, Pelaksanaan dan Penata Usahaan Pendapatan Daerah, Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Kabupaten, Laporan Realisasi semester pertama APBK dan Perubahan APBK. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK, Informasi Keuangan Daerah
- CATATAN : - Qanun A. Singkil ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 November 2022 dan ditetapkan tanggal 14 November 2022;
- Pada saat Qanun A. Singkil ini mulai berlaku, Qanun A. Singkil No. 6 Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Lampiran: 28 Hlm.